

**STRATEGI PENDIRIAN BANK PERTANIAN
SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN
PEMBIAYAAN PERTANIAN DI PROVINSI
JAWA TENGAH DENGAN METODE
*ANALYTICAL NETWORKING PROCESS***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

GIVA PRADIPTA

NIM. 12020112130066

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Giva Pradipta
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112130066
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **STRATEGI PENDIRIAN BANK PERTANIAN
SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN
PEMBIAYAAN PERTANIAN DI PROVINSI
JAWA TENGAH DENGAN METODE
ANALYTICAL NETWORKING PROCESS**
Dosen Pembimbing : Arif Pujiyono, S.E., M.Si.

Semarang, 15 Desember 2016

Dosen Pembimbing



Arif Pujiyono, S.E., M.Si.
NIP. 197112221998021004


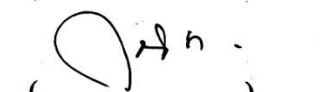
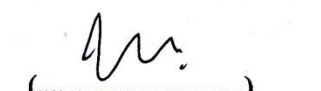
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Giva Pradipta
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112130066
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **STRATEGI PENDIRIAN BANK PERTANIAN
SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN
PEMBIAYAAN PERTANIAN DI PROVINSI
JAWA TENGAH DENGAN METODE
ANALYTICAL NETWORKING PROCESS**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Desember 2016

Tim Penguji

1. Arif Pujiyono, S.E., M.Si.
2. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.
3. Nenek Woyanti, S.E., M.Si.


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I



Anis Chariri, SE., Mcom., PhD., Akt.

NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Giva Pradipta, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Strategi Pendirian Bank Pertanian Syariah Untuk Meningkatkan Pembiayaan Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Metode *Analytical Networking Process*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,

(Giva Pradipta)

NIM. 12020112130066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah: 216)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

(QS: Al-Baqarah: 188)

“Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, mata yang akan terus menatap ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja. Dan hati yang akan bekerja keras dari biasanya.

Serta mulut yang akan selalu berdo’a.” (Film 5cm)

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya.”

*SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK IBU DAN BAPAK TERCINTA,
ADIKKU GISCA DAN GILDA TERSAYANG,
SILFIA NURUL FARAHDINA,
SERTA MASYARAKAT JAWA TENGAH.*

ABSTRACT

The role of the agricultural sector nowadays is very strategic in the national economy, but it has not been balanced yet with the the provision of adequate capital support. The proportion of the distribution of funding on Islamic banking institutions are still low to the agricultural sector, so it could lead to the emergence of consideration in the establishment of banks that specifically financing for the agricultural sector. One of the proposed financial institution is sharia agricultural bank, as a potential financing for agriculture in Central Java province. However, the potential is inhibited by some constraints such as management problems, human resources, government, infrastructure and socialization which still not formulated yet in the establishment of sharia agricultural bank.

This study aims to analyze the appropriate strategy to make the establishment of sharia agricultural bank, to improve the agricultural financing in Central Java province. This study uses Analytical Network Process (ANP) method.

The results of the analysis of ANP showed that five aspects of agricultural bank establishment to improve the agricultural financing in Central Java province produces management aspects as a priority in supporting of sharia agricultural bank commitment, whereas it provided agricultural financing according to the rules of fiqih muamalah and followed by government support in the establishment sharia agricultural bank in licensing and investments, also improving the quality of human resources by providing training. Recommended strategies will multiply the socialization of agriculture financing in the sharia agricultural bank supported by proper infrastructures in agricultural areas.

Keywords: Sharia Agricultural Bank, Analytical Network Process (ANP), strategy priority

ABSTRAK

Peran sektor pertanian yang sangat strategis dalam perekonomian nasional belum diimbangi dengan dukungan penyediaan modal yang memadai. Proporsi penyaluran pembiayaan pada lembaga perbankan syariah yang masih rendah ke sektor pertanian, memunculkan pemikiran dalam pendirian perbankan yang khusus membiayai untuk sektor pertanian. Salah satu bentuk lembaga keuangan yang diusulkan adalah bank pertanian syariah sebagai potensi pembiayaan untuk pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Potensi tersebut terhambat dengan kendala berupa permasalahan manajemen, sumber daya manusia, pemerintah, infrastruktur dan sosialisai yang masih belum merumuskan dalam pendirian bank pertanian syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang tepat untuk melakukan pendirian bank pertanian syariah untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP).

Hasil analisis ANP menunjukkan bahwa dari kelima aspek pendirian bank pertanian syariah untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah menghasilkan aspek manajemen sebagai prioritas utama dalam mendukung komitmen bank pertanian syariah sebagai pembiayaan pertanian sesuai kaidah fiqih muamalah dan diikuti dengan dukungan pemerintah dalam pendirian bank pertanian syariah dalam perizinan dan penyertaan modal bank, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengadaan pelatihan dan training. Rekomendasi strategi juga memperbanyak sosialisasi terhadap pembiayaan pertanian di bank pertanian syariah dengan didukung infrastruktur yang memadai pada daerah-daerah pertanian.

Kata Kunci : Bank Pertanian Syariah, *Analytical Network Process* (ANP), prioritas strategi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pendirian Bank Pertanian Syariah Untuk Meningkatkan Pembiayaan Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Metode *Analytical Networking Process*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan FEB UNDIP. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D., selaku ketua Jurusan IESP UNDIP dan terima kasih kepada seluruh dosen IESP FEB UNDIP atas pembelajaran selama penulis menempuh masa studi.
2. Terima kasih penulis ucapkan kepada Arif Pujiyono, S.E., M.Si. selaku dosen wali dan dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan, motivasi dan kemudahan selama penyusunan skripsi ini
3. Kedua orang tua Ibunda Nining Winarni dan Ayahanda Yusup Supriadi yang telah memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan kepada penulis, serta adik-adikku Gisca dan Gilda yang telah menjadi penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
4. Silfia Nurul Farahdian yang telah meluangkan waktu, mendampingi, memotivasi, memberikan masukan, dan menjadi kawan terbaik selama penulis menempuh masa studi hingga saat ini.
5. Teman-teman IESP angkatan 2012 yang telah menemani, bertukar pikiran, dan berjuang selama perkuliahan.
6. Rekan-rekan seorganisasi pengurus HMJ IESP UNDIP periode 2012/2013, BEM FEB UNDIP 2013/2014 serta KESMES UNDIP yang telah berbagi canda dan tawa dan sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga selama berorganisasi.

7. Sahabat penulis selama perkuliahan arul, wahid, saka, mas rofiq, sindhu, yugo, mas anding, debik, salman, alan, sahabat pria sholeh, sahabat SP prissa, citra, aneka dan sahabat tim G12 silfi, clara, shelby, citra, asti, anicha, mahardea, betha, zaka, agha, joseph alfredo.
8. Seluruh keluarga besar KKN TEMATIK KEC TUGU 2015 yang telah memberi pelajaran dan pengalaman selama 25 hari yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
9. Seluruh para narasumber dosen, dinas pertanian Jawa Tengah, Bank Indonesia, Bank Central Asia, Bank Syariah Mandiri dan petani yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber skripsi saya.
10. Seluruh staf, karyawan UNDIP dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

Semarang, 12 Desember 2016

Giva Pradipta

NIM. 12020112130066

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	16
2.1.1 Pertanian.....	16
2.1.2 Pengertian Bank	20
2.1.3 Penelitian Terdahulu	29
2.2 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Metode Pendekatan Masalah.....	40
3.2 Populasi Dan Sampel.....	41
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.3.1 Data Primer	42
3.3.2 Data Sekunder	42
3.4 Metode Pengumpulan Data	42
3.5 Metode Analisis.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	50
4.2 Gambaran Umum Pendirian Bank Pertanian Syariah di Jawa Tengah ..	52
4.3 Analisis Data	53
4.3.1 Dekomposisi (<i>Decomposition</i>).....	53
4.3.2 Perbandingan Berpasangan (<i>Pairwise Comparison</i>)	63
4.3.3 Analisis dan Intepretasi Hasil <i>Analytic Network Process</i> (ANP) ...	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2011-2014	4
Tabel 1.2 Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2011-2014.....	5
Tabel 1.3 Data Bank Umum Syariah Berdasarkan Indikator Tahun 2011-2014	6
Tabel 1.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 200 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (Dalam Persen)	8
Tabel 1.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011-2014.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Nilai Perbandingan Antar Elemen	46
Tabel 4.1 Hasil Perbandingan Berpasangan dari Segi Aspek Masalah	63
Tabel 4.2 Hasil Perbandingan Berpasangan dari Segi Sub Aspek Masalah	64
Tabel 4.3 Hasil Perbandingan Berpasangan dari Segi Aspek Solusi	65
Tabel 4.4 Hasil Perbandingan Berpasangan dari Segi Sub Aspek Solusi.....	66
Tabel 4.5 Hasil Perbandingan Berpasangan dari Segi Aspek Strategi.....	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 3.1 Tahapan dalam ANP	45
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	50
Gambar 4.2 Jaringan <i>Analytic Network Process</i> (ANP)	60
Gambar 4.3 Jaringan Umpan Balik <i>Analytic Network Process</i> (ANP).....	61
Gambar 4.4 Prioritas Masalah.....	68
Gambar 4.5 Prioritas Masalah Aspek Manajemen.....	69
Gambar 4.6 Prioritas Masalah Aspek SDM.....	70
Gambar 4.7 Prioritas Masalah Aspek Pemerintah	71
Gambar 4.8 Prioritas Masalah Aspek Infrastruktur	72
Gambar 4.9 Prioritas Masalah Aspek Sosialisasi.....	72
Gambar 4.10 Prioritas Solusi	73
Gambar 4.11 Prioritas Solusi Aspek Manajemen	74
Gambar 4.12 Prioritas Solusi Aspek SDM	75
Gambar 4.13 Prioritas Solusi Aspek Pemerintah.....	76
Gambar 4.14 Prioritas Solusi Aspek Infrastruktur.....	77
Gambar 4.15 Prioritas Solusi Aspek Sosialisasi	77
Gambar 4.16 Prioritas Strategi	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Pra Kuesioner ANP Pendirian Bank Pertanian Syariah Untuk Meningkatkan Pembiayaan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah	87
Lampiran B. Kuesioner ANP Pendirian Bank Pertanian Syariah Untuk Meningkatkan Pembiayaan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah	90
Lampiran C. Tabulasi Data Mentah ANP	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar lahannya digunakan untuk bercocok tanam. Proses pembangunan Indonesia sebagai negara agraris menjadikan sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional dan sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia dan sebagian pendapatan hasil ekspor Indonesia berasal dari sektor pertanian, sehingga sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan pangan dan sandang bagi penduduk (Yuniarto, 2008).

Pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktik usahatani yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk Negara Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Sejalan dengan target utama Kementerian Pertanian 2010-2014 meliputi: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; (4)

peningkatan kesejahteraan petani. Strategi yang akan dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus terhadap tujuh aspek dasar yaitu: (1) lahan; (2) perbenihan dan perbibitan; (3) infrastruktur dan sarana; (4) sumber daya manusia; (5) pembiayaan petani; (6) kelembagaan petani; (7) teknologi dan industri hilir (Kementan, 2014).

Menurut Ashari (2009), walaupun perannya sangat strategis sektor pertanian masih menghadapi banyak permasalahan, diantaranya keterbatasan permodalan petani dan pelaku usaha pertanian lain. Permasalahan mendasar bagi pengembangan usaha pertanian adalah lemahnya permodalan pelaku usaha pertanian baik dalam pemilikan maupun akses terhadap permodalan melalui lembaga keuangan perbankan. Lemahnya kepemilikan modal disebabkan oleh kecilnya skala usaha sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan akumulasi modal, sementara lemahnya akses petani kecil terhadap lembaga keuangan perbankan disebabkan oleh prosedur dan persyaratan yang tidak sederhana yang harus dipenuhi oleh petani. Di sisi lain pihak perbankan sendiri kurang tertarik untuk membiayai sektor pertanian yang dipandang berisiko tinggi, baik karena gangguan alam seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman, maupun fluktuasi harga.

Dalam dunia perbankan sendiri terdapat dua bentuk yaitu bank konvensional dan syariah. Bank konvensional dalam kegiatannya menggunakan sistem bunga yang terinspirasi dari sistem ekonomi kapitalis dengan jalan menarik keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkan melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjam kembali masyarakat dengan

tambahan berupa bunga, sedangkan prinsip syariah berdasarkan hukum Islam dan tidak mengenal bunga tetapi bagi hasil.

Sejarah kredit pertanian di Indonesia paling tidak sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda, yaitu saat dirintisnya pelayanan kredit untuk petani dengan pendirian Bank Desa dan Lumbung Desa. Kedua jenis lembaga kredit tersebut termasuk pada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR (Soentoro *et al.* 1992). Adapun kredit untuk menunjang kegiatan usahatani mulai diprogramkan secara khusus pada awal 1960-an. Pada tahun 1965, program perkreditan pertanian semakin dimantapkan dengan dilaksanakannya program Bimas. Dari waktu ke waktu model program kredit pertanian ini telah mengalami berbagai perubahan, diantaranya mencakup yang terkait dengan prosedur penyaluran, besaran dan bentuk kredit, bunga kredit maupun tenggang waktu pengembalian (Taryoto, 1992).

Industri perbankan tentu tidak lepas dari alokasi kredit atau pembiayaan dalam menopang ekonomi nasional berdasarkan beberapa sektor ekonomi baik di bank konvensional maupun bank syariah. Salah satunya merupakan pembiayaan pada sektor pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014 menyatakan bahwa alokasi kredit atau pembiayaan pada sektor pertanian di bank konvensional memiliki kontribusi penyaluran dana yang lebih besar dibandingkan dengan bank syariah. Berikut merupakan data alokasi kredit bank umum berdasarkan sektor ekonomi pada tahun 2011-2014 dapat dilihat di Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi
Tahun 2011-2014 (dalam persen)

Sektor Ekonomi	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Peternakan, Kehutanan	7,5	7,8	12,7	13,4
Pertambangan dan galian	5,7	5,5	5,9	5,9
Industri pengolahan	22,5	23,4	21,1	20,9
Listrik, Gas dan air	3,0	3,1	4,4	4,3
Konstruksi	4,9	5,0	5,5	5,9
Perdagangan, hotel dan restoran	24,5	26,2	30,7	29,6
Pengangkutan dan komunikasi	8,4	8,7	8,4	8,1
Jasa dunia usaha	14,4	14,4	7,8	6,8
Jasa sosial masyarakat	1,0	0,8	1,8	1,5
Lain-lain	8,2	5,1	1,7	3,7

Sumber: Indonesia Banking Statistic Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan alokasi kredit pada bank umum berdasarkan sektor ekonomi tahun 2011-2014. Penyaluran kredit pada bank umum didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran setiap tahunnya. Sektor pertanian memiliki alokasi kredit yang cukup besar di bank umum. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2014 alokasi kredit di sektor pertanian, peternakan dan kehutanan mencapai 13,4% dari total alokasi kredit yang dikeluarkan bank umum di Indonesia. Alokasi kredit pada bank umum untuk sektor pertanian selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal itu menjadikan bahwa pentingnya permodalan bagi pelaku usaha di sektor pertanian. Sedangkan untuk pembiayaan pada bank umum syariah dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi
Tahun 2011-2014 (dalam persen)

Sektor Ekonomi	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Peternakan, Kehutanan	2,1	1,9	1,7	2,8
Pertambangan dan galian	1,7	1,4	1,6	2,3
Industri pengolahan	4,0	3,4	3,3	6,7
Listrik, Gas dan air	2,3	2,1	2,5	2,8
Konstruksi	5,7	4,8	4,4	5,9
Perdagangan, hotel dan restoran	9,5	8,6	7,8	12,2
Pengangkutan dan komunikasi	3,3	2,9	2,9	6,1
Jasa dunia usaha	25,0	25,2	25,9	33,5
Jasa sosial masyarakat	4,3	5,3	6,6	5,5
Lain-lain	42,0	44,3	43,3	22,2

Sumber: Indonesia Banking Statistic Tahun 2014, Data Diolah

Pada Tabel 1.2 menunjukkan pembiayaan perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi pada tahun 2011-2014. Pada perbankan syariah untuk alokasi pembiayaan di sektor pertanian masih sangat rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan perbankan syariah di sektor pertanian mengalami tingkat terbawah nomor ketiga setelah sektor lain. Rendahnya pembiayaan syariah di sektor pertanian menjadi bukti bahwa alokasi kredit untuk pertanian masih menjadi kendala dengan adanya resiko pada usaha pertanian. Hal ini terbukti pada tahun 2014 pembiayaan pertanian pada perbankan syariah hanya 2,8% dari seluruh pembiayaan yang ada di perbankan syariah.

Menurut Indiastuti (2005), kondisi minimnya pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) pengalaman dan trauma beberapa bank menghadapi kenyataan kredit bermasalah sewaktu pengucuran KUT, (2) aturan Bank Indonesia yang cukup ketat agar bank *prudent* dalam

penyaluran dana, serta (3) banyak bank (khususnya bank besar) yang tidak memiliki pengalaman menyalurkan kredit mikro.

Lembaga keuangan seperti bank masih sangat hati-hati untuk menyalurkan dana ke sektor pertanian karena menyangkut pertimbangan kepentingan bisnis. Seringkali argumen yang mengemuka adalah sebagai sebuah korporasi bisnis, dimana perbankan yang merupakan lembaga intermediasi keuangan harus mampu mengelola dana nasabah agar memberikan keuntungan yang optimal. Konsekuensinya adalah sektor usaha yang memiliki ekspektasi keuntungan yang besar akan mendapat prioritas pembiayaan, sehingga perbankan dapat terus dipercaya masyarakat dan tetap eksis dalam berusaha.

Berdasarkan hasil kajian pendirian bank pertanian (Syukur et al, 2003) mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi seperti manajemen resiko pada penyaluran pembiayaan pertanian, sumber daya manusia pada perbankan, infrastruktur yang belum mendukung pada bank pertanian, dan masih lemahnya modal yang dilakukan untuk pendirian atau mewujudkan bank pertanian.

Tabel 1.3
Data Bank Umum Syariah Berdasarkan Indikator Tahun 2011-2014

Indikator	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Non Performing Financing (%)	2,52	2,22	2,62	4,95
Tenaga Kerja BUS (Miliar Rupiah)	21.820	24.111	26.717	41.393
Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Miliar Rupiah)	6.568	8.846	11.560	12.905
Jumlah Kantor BUS (Miliar Rupiah)	1.401	1.745	1.998	2.151
Biaya Promosi (Miliar Rupiah)	339	372	370	300

Sumber: Indonesia Banking Statistic Tahun 2014, Data Diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan pada Tabel 1.3 pada bank umum syariah menyebutkan bahwa selama ini rasio pembiayaan

bermasalah (NPF) dari tahun 2011 hingga 2014 mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan bank umum syariah selama ini masih belum konsisten atau mengatasi masalah dalam penyaluran dananya. Hal ini terbukti bahwa bank umum syariah masih menghadapi manajemen resiko pada pembiayaan yang meliputi seperti pertanian. Pada indikator tenaga kerja pada bank umum syariah mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja tiap tahunnya. Hal ini diikuti dengan peningkatan biaya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bank umum syariah. Akses pembangunan kantor-kantor cabang pada bank umum syariah mulai meningkat tiap tahunnya, akan tetapi pembangunan infrastruktur pada bank umum syariah masih kalah dengan perkembangan bank konvensional. Pada bank umum syariah selama ini masih minimnya biaya promosi yang dilakukan terbukti dari tahun 2012 hingga 2014 biaya promosi mengalami penurunan.

Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 992 ribu hektar (30,47 persen) merupakan lahan sawah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional. Kontribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah menyumbang 106.029.380,88 juta rupiah pada sektor pertanian (BPS, 2015). Hal ini menjadi bukti bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 maka diperoleh distribusi PDRB menurut lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel 1.4
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (Dalam Persen)

Lapangan Usaha	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Pertanian	18,69	17,85	17,41	16,81
Pertambangan dan galian	1,12	1,11	1,12	1,12
Industri pengolahan	32,83	33,01	32,73	32,76
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,86	0,86	0,86	0,88
Bangunan	5,89	5,93	5,96	6,03
Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,42	21,77	22,16	22,51
Pengangkutan dan Komunikasi	5,24	5,37	5,45	5,49
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,76	3,78	3,89	4,07
Jasa-Jasa	10,18	10,32	10,42	10,33

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2014

Pada Tabel 1.4 menunjukkan data distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2013 pada sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2013 tiap tahunnya, akan tetapi sektor pertanian memiliki kontribusi besar bagi PDRB Jawa Tengah. Hal ini terbukti pada setiap tahunnya sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar nomor ketiga setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2013 sektor pertanian menyumbang sebesar 16,81 persen dari total seluruh distribusi PDRB di Jawa Tengah. Dengan potensi yang ada di sektor pertanian di Jawa Tengah menjadikan perhatian yang cukup besar bagi pemerintah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan sumber daya alam yang ada sebagai pendapatan domestik.

Berdasarkan Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2014 tercatat sebesar 33,52 juta jiwa sekitar 13,29 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur (BPS, 2015). Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur 15

tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha. Berikut merupakan data penduduk Jawa Tengah menurut lapangan pekerjaan utama pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Perkerjaan Utama Tahun 2011-2014

Lapangan Usaha	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Pertanian	33.78	31.39	30.86	31.26
Pertambangan dan Penggalian	0.50	0.57	0.42	0.53
Industri Pengolahan	19.14	20.44	19.07	19.17
Listrik, Gas dan Air	0.18	0.16	0.13	0.17
Bangunan	6.89	7.48	5.95	7.67
Perdagangan Besar, Eceran	21.38	21.37	22.46	22.45
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	3.54	3.40	3.78	3.55
Keuangan, Asuransi dan Jasa Perusahaan	1.66	1.75	1.97	1.95
Jasa Kemasyarakatan, Sosial	12.92	13.44	15.36	13.26

Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2015

Berdasarkan pada Tabel 1.5 data penduduk Jawa Tengah berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama didominasi sektor pertanian. Pada tahun 2014 penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 31,26 persen dari total penduduk yang bekerja. Lapangan pekerjaan pada sektor pertanian menjadi sektor unggulan bagi penduduk Jawa Tengah sebagai mata pencaharian.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia menjadi negara pelopor dan kiblat perkembangan perbankan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil, karena Indonesia memiliki potensi untuk menjadi *global player* (pemain dunia) perbankan syariah. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu yang memiliki penduduk beragama Islam sebesar 96,75 persen sehingga sangat potensial untuk dijadikan nasabah pada industri perbankan syariah, prospek ekonomi cerah

tercemin dari pertumbuhan ekonomi relatif tinggi serta ditopang oleh dasar ekonomi yang solid. Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi perbankan syariah.

Menurut Ashari dan Saptana (2005) setidaknya ada tiga sifat yang melekat pada skim kredit pertanian yang berpeluang menimbulkan ketidakefektifan. *Pertama*, kredit selalu berbasis bunga tetap (*fix interest*). *Kedua*, terdapat kesenjangan (*gap*) dalam “ruang usaha” antara peminjam (debitor) dan pemberi pinjaman (kreditor). *Ketiga*, sistem pembiayaan pertanian selama ini diintegrasikan dengan pembiayaan nonpertanian.

Kebutuhan pembiayaan di sektor pertanian dapat dipenuhi melalui lembaga keuangan non perbankan, selain kelembagaan keuangan perbankan. Lembaga keuangan non perbankan yang ada di masyarakat dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, khususnya bagi petani yang menggunakan jasa pinjaman tersebut. Dampak positif dari lembaga keuangan non perbankan yaitu proses pencairan dana yang cepat karena tidak memerlukan administrasi yang panjang. Dampak negatif dari lembaga keuangan non perbankan yaitu petani yang meminjam modal ke pedagang besar (tengkulak) diharuskan menjual hasil panennya kepada pedagang besar (tengkulak) tersebut, sehingga petani memiliki keterbatasan pasar untuk menjual hasil panennya. Jika petani dapat memperoleh kebebasan pasar yang akan berpengaruh pada penentu harga jual hasil panennya.

Rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian, selain karena faktor risiko yang tinggi juga disebabkan oleh sistem pembiayaan di perbankan yang

tidak membedakan antara sektor pertanian dan nonpertanian. Dengan demikian tidak ada perlakuan khusus untuk sektor pertanian, misalnya tingkat suku bunga, sistem penyaluran, dan sistem pengembalian. Jika sistem penghitungan usaha pada sektor nonpertanian (terutama industri dan jasa) diterapkan untuk usaha pertanian maka hasilnya cenderung *over estimate*. Apabila dipaksakan menyebabkan usaha pertanian tidak akan mendapat dukungan kredit dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan (Ashari dan Septana, 2005).

Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan yaitu petani tidak memiliki kebebasan pasar untuk menjual hasil panennya, sehingga petani tidak memiliki kekuatan dalam penentuan harga jual panennya. Permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian jika dibandingkan dengan alokasi kredit untuk sektor lainnya. Hal ini dikarenakan perbankan tidak memiliki fokus dalam pembiayaan terhadap satu sektor, sehingga alokasi pembiayaan tidak dapat tersalurkan secara penuh untuk satu sektor yang menjadi prioritas utama. Adapun permasalahan lainnya yaitu tingkat suku bunga yang dibebankan bagi petani dalam melakukan pinjaman kepada bank, hal ini mengakibatkan bagi petani mengalami kesulitan dalam pengembalian kredit. Kesulitan yang dialami oleh petani ini mengakibatkan jurang kemiskinan bagi petani, maka perlunya skim kredit berbasis syariah untuk memudahkan bagi para petani dalam pembiayaan pertanian.

Untuk lebih menjamin rasa keadilan bagi pelaku bisnis pertanian, perlu dibuka wacana model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian. Salah satu model yang sudah mulai dicoba diterapkan adalah

dengan skim syariah. Departemen Pertanian telah memberikan penilaian positif dan akan mengimplementasikan pembiayaan syariah ini, yang ditunjukkan adanya pencanangan gerakan tabungan syariah (Gema Syariah) pada tahun 2005. Gema Syariah diharapkan menjadi salah satu program unggulan Departemen Pertanian, disamping rencana program penjaminan kredit usaha pertanian secara syariah.

Tulisan ini bertujuan melakukan penelitian terhadap peluang atau potensi pendirian bank pertanian syariah di Provinsi Jawa Tengah serta kendala-kendala yang dihadapi. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti “***STRATEGI PENDIRIAN BANK PERTANIAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH***”

1.2 Rumusan Masalah

Belum optimalnya dukungan lembaga perbankan yang ada saat ini dalam mendanai sektor pertanian merupakan tantangan untuk mewujudkan sebuah lembaga keuangan yang secara spesifik menangani sektor pertanian yaitu bank pertanian. Hal ini masih sangat dibutuhkan perbankan yang fokus dalam membiayai pertanian sebagai tantangan bagi perbankan yang selama ini masih sangat relatif kecil dalam membiayai pertanian. Faktor *crucial* dalam pembentukan bank pertanian agar efektif dan efisien adalah lembaga keuangan tersebut harus secara seksama memperhatikan karakteristik sektor pertanian.

Pembiayaan syariah menjadi hal penting untuk menghindari adanya tingkat suku bunga yang menitik beratkan dengan prinsip syariah dalam

pembiayaannya. Oleh sebab itu perlu adanya pendirian Bank Pertanian Syariah untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana permasalahan pendirian bank pertanian syariah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana strategi pendirian bank pertanian syariah untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang hendak dicapai dan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian ini.

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui permasalahan pendirian bank pertanian syariah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk merancang strategi pendirian bank pertanian syariah untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan solusi pada perbankan sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian.
2. Penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat, khususnya dalam pendirian Bank Pertanian Syariah sebagai solusi pembiayaan pertanian.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Penutup. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil penelitian yang meliputi deskripsi objek penelitian, menguraikan hasil analisis data dan interpretasinya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran berkaitan dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan.